

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2011). Kemiskinan masih menjadi masalah utama di beberapa negara agraris, termasuk Indonesia. Meskipun kemiskinan di Indonesia telah ada sejak lama, kemiskinan inilah yang membuat banyak masyarakat Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Prawoto, 2009). Oleh karena itu, kemiskinan yang terjadi di suatu negara sebenarnya harus dipandang sebagai masalah yang sangat penting.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Azzahra & Desmawan, 2023). Sedangkan pengertian kesejahteraan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 Ayat 1 itu sendiri adalah dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial penduduk suatu negara sehingga mereka dapat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana mestinya. Dengan

begitu tingkat kemiskinan adalah salah satu cara untuk menggambarkan kesejahteraan umum Indonesia (Suharto, 2015).

Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang mengganggu rencana pembangunan pemerintah Indonesia (Sinurat, 2023). Kemiskinan di definisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara ekonomi (Hardinandar, 2019). Meskipun berbagai kebijakan dan program belanja sosial telah dibuat dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya, faktanya bahwa memecahkan rantai kemiskinan secara menyeluruh masih menjadi masalah yang belum terselesaikan (Solikatun et al., 2014).

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang buruk adalah dua tanda utama kemiskinan (Prayoga et al., 2021). Kondisi ini menciptakan jarak yang lebar antara masyarakat miskin dan mereka yang memiliki potensi ekonomi yang lebih baik (Istyawan, 2025). Perbedaan inilah yang mempertahankan ketimpangan sosial dan menghalangi orang-orang di garis bawah kemiskinan untuk melakukan mobilitas vertikal (Mardiah et al., 2024).

Tabel 1. 1 Angka Kemiskinan ASEAN

Negara	Persentase	Jumlah Orang
Laos	68,9%	5,87 juta
Indonesia	60,3%	172 juta
Filipina	50,6%	58,59 juta
Vietnam	18,2%	18,38 juta
Thailand	7,1%	5,1 juta

Malaysia	1,3%	462.800
China	11,9%	166,6 juta

Sumber: Data diolah Bisnis.com (2025)

Data *Macro Proverty Otlook* Bank Dunia tahun 2024 menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam dikawasan ASEAN. Indonesia mencatat angka kemiskinan sebesar 60,3%, menempatkannya sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua dibawah Laos yang mencapai 68,9%. Tentu kondisi ini berbanding jauh dengan negara tetangga lain, seperti Thailand yang hanya sebesar 7,1% dan Malaysia yang berhasil menekan angka kemiskinannya hingga tersisa 1,3% saja (Mahardika, 2025).

Tabel 1. 2 Angka Kemiskinan Indonesia

Tahun	Persentase
2018	9,82
2019	9,41
2020	9,78
2021	10,14
2022	9,54
2023	9,36
2024	9,03
2025	8,47

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 9,82% di tahun 2018 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Meskipun sempat terjadi kenaikan pada priode 2020 sebesar 9,78% hingga puncaknya 2021 mencapai 10,14%, yang menunjukkan kenaikan besar tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi, grafik

kembali membaik secara konsisten sejak 2022 hingga mencapai angka terendah di tahun 2024 sebesar 9,03%.

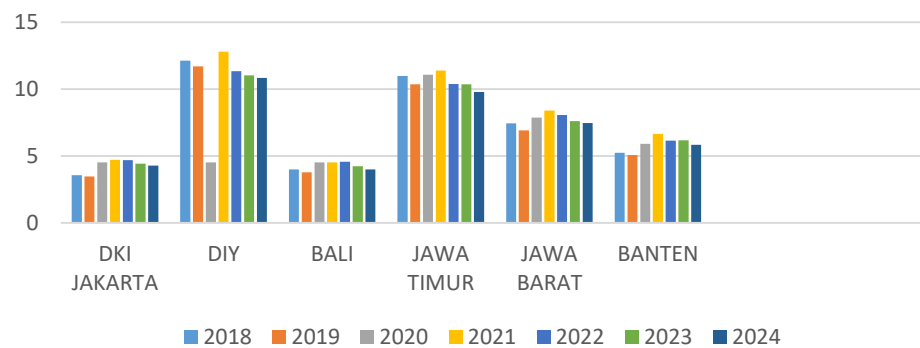
Kemiskinan bukan hanya masalah angka, tetapi justru kemiskinan memiliki dampak besar yang bisa merusak berbagai sendi kehidupan. Dampak buruk kemiskinan mencakup penurunan kualitas kesehatan akibat gizi buruk dan terbatasnya akses medis, yang secara langsung menurunkan angka harapan hidup masyarakat (Azahari, 2020). Selain itu, kemiskinan juga menciptakan hambatan besar bagi akses pendidikan, dimana anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami putus sekolah atau rendahnya kualitas pembelajaran karena keterbatasan biaya operasional pendidikan (Firmansyah & Khairunnisa, 2023).

Dalam jangkauan yang lebih luas, kondisi kemiskinan ini memicu peningkatan angka kriminalitas karena adanya keterdesakan ekonomi, serta permanennya siklus keterbelakangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (Fajriawati, 2016). Karena dampak negatif kemiskinan terhadap stabilitas sosial dan sumber daya manusia, kemiskinan harus segera diatasi melalui kebijakan struktural yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Meskipun DKI Jakarta, DIY dan Bali dikenal sebagai provinsi penyumbang utama ekonomi nasional dengan pertumbuhan yang baik, ternyata ketiga provinsi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Arifani, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan tidak selalu terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga kelompok

marginal sering tertinggal di tengah kemajuan kota (Rodríguez-Pose & Storper, 2019). Oleh karena itu, untuk mencegah gejala sosial yang lebih luas, masalah kemiskinan di wilayah ekonomi maju ini harus segera ditangani.

Tingkat Kemiskinan (%)



Provinsi	Tahun	Tingkat Kemiskinan (Maret %)
DKI Jakarta	2018	3,57
	2019	3,47
	2020	4,53
	2021	4,72
	2022	4,69
	2023	4,44
	2024	4,3
DIY	2018	12,13
	2019	11,7
	2020	4,53
	2021	12,8
	2022	11,34
	2023	11,04
	2024	10,83
Bali	2018	4,01
	2019	3,79

	2020	4,53
	2021	4,53
	2022	4,57
	2023	4,25
	2024	4
Jawa Timur	2018	10,98
	2019	10,37
	2020	11,09
	2021	11,4
	2022	10,38
	2023	10,35
	2024	9,79
	2025	9,5
Jawa Barat	2018	7,45
	2019	6,91
	2020	7,88
	2021	8,4
	2022	8,06
	2023	7,62
	2024	7,46
	2025	7,02
Banten	2018	5,24
	2019	5,09
	2020	5,92
	2021	6,66
	2022	6,16
	2023	6,17
	2024	5,84
	2025	5,63

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Provinsi)

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2024, terlihat kesenjangan yang cukup lebar antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, di mana Bali sebesar 4% dan DKI Jakarta sebesar 4,3% yang secara konsisten memimpin dengan angka kemiskinan terendah, disusul oleh Banten sebesar 5,84% yang menunjukkan stabilitas relatif di atas kedua wilayah tersebut. Sementara itu, Jawa Barat 7,46% berada di posisi menengah dengan tren penurunan yang cukup baik, namun angka tersebut masih terpaut jauh di bawah DI Yogyakarta 10,83% yang tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam kelompok ini.

Meskipun kelima provinsi tersebut menunjukkan pemulihan pasca-pandemi 2021, DI Yogyakarta masih menghadapi tantangan struktural yang berat karena angkanya tetap berada di atas rata-rata kemiskinan nasional, berbanding terbalik dengan Bali dan DKI Jakarta yang telah berhasil menekan kemiskinan hingga ke level yang sangat rendah.

Rendahnya angka kemiskinan di DKI Jakarta 4,3% dan Bali 4% pada tahun 2025⁴ menjadi indikator kuat bagi para investor bahwa kedua wilayah ini memiliki daya beli masyarakat yang stabil dan infrastruktur yang sangat matang. Di DKI Jakarta, statusnya sebagai pusat ekonomi global menarik investasi jumbo hingga Rp270,9 triliun pada 2025, terutama pada sektor transportasi dan telekomunikasi, yang memperkuat posisinya sebagai kota jasa berskala internasional (Pemprov DKI Jakarta, 2026).

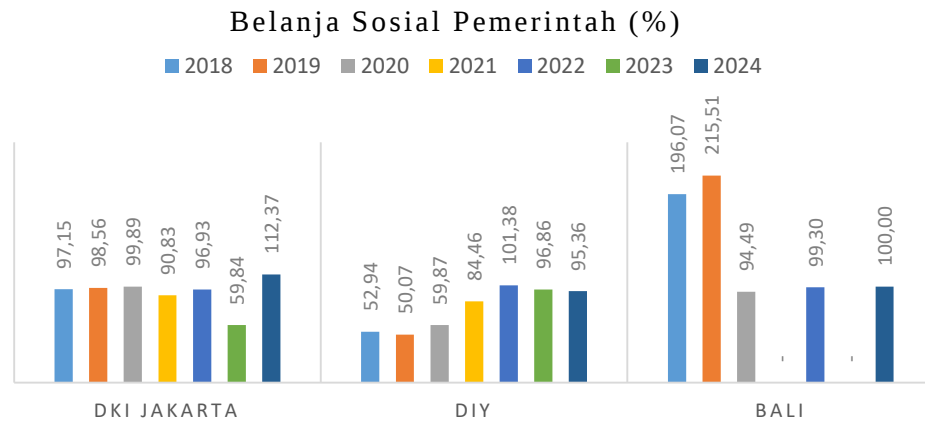
Sementara itu, Bali tetap menjadi primadona investasi pariwisata dengan realisasi mencapai Rp42,8 triliun, di mana para investor kini melirik proyek

strategis seperti *Bali Urban Rail* serta pengembangan kawasan wisata mewah di pesisir pantai (Pemerintah Provinsi Bali, 2026). Di sisi lain, meskipun DI Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi 10,83%, wilayah ini tetap menjadi magnet investasi ekonomi kreatif dan retail berkat ikon budaya seperti Malioboro; hal ini terbukti dari tingginya aktivitas ekonomi di Teras Malioboro yang mencatatkan transaksi hingga Rp78,3 miliar dari jutaan wisatawan, yang menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan perhotelan di masa depan (Harminanto, 2026).

Kemiskinan sering kali terjadi karena masyarakat tidak memiliki modal usaha, sehingga mereka terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (Indika & Marliza, 2019). Oleh karena itu, pembagian dana belanja daerah harus lebih fokus pada program bantuan dana agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Handraini et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Carolina, 2021) menunjukkan bahwa besar kecilnya anggaran belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah berupaya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan melalui belanja atau dana sosial, yaitu uang yang disiapkan negara untuk diberikan kepada warga yang sedang kesulitan ekonomi (Melati et al., 2021). Dana sosial ini berfungsi sebagai penahan beban agar warga miskin tetap bisa makan, sekolah, dan berobat meskipun tidak memiliki penghasilan yang cukup. Dengan adanya bantuan ini, beban hidup masyarakat jadi lebih ringan sehingga mereka punya

kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya di masa depan (Putri & Effendi, 2021).



Provinsi	Tahun	Tingkat Kemiskinan (Maret %)	Belanja Sosial Pemerintah (%)
DKI Jakarta	2018	3,57	97.15
	2019	3,47	98.56
	2020	4,53	99.89
	2021	4,72	90.83
	2022	4,69	96.93
	2023	4,44	59.84
	2024	4,3	112.27
DIY	2018	12,13	52.94
	2019	11,7	50.07
	2020	4,53	59.87
	2021	12,8	84.46
	2022	11,34	101.38
	2023	11,04	96.86
	2024	10,83	95.36
Bali	2018	4,01	196.07
	2019	3,79	215.51
	2020	4,53	94.49
	2021	4,53	0,00

Jawa Timur	2022	4,57	99.30
	2023	4,25	0,00
	2024	4	100.00
	2018	10,98	280.64
	2019	10,37	68.03
	2020	11,09	75.36

Gambar 1. 2 Belanja Sosial Pemerintah

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2024)

Berdasarkan data yang disajikan, tabel tersebut menunjukkan pergerakan persentase belanja sosial pemerintah di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali dari tahun 2018 hingga 2024. Di DKI Jakarta, alokasi dana sosial terlihat sangat tinggi pada tahun 2024 yang mencapai 112,27%, sementara DIY menunjukkan tren yang cenderung stabil di angka 95,36% pada akhir periode. Di sisi lain, Bali memiliki data yang cukup tajam, bahkan sempat menyentuh angka 0,00% pada tahun 2021 dan 2023 sebelum kembali stabil. Dari data diatas dapat disimpulkan jika belanja sosial semakin meningkat, artinya pemerintah sedang berupaya mengatasi dan menekan angka kemiskinan yang ada.

Upaya lain pemerintah untuk memudahkan masyarakat miskin juga dengan memberikan subsidi pangan. Pemberian subsidi pangan oleh pemerintah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin karena mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar sehingga tetap terjangkau (Jamaludin, 2022).

Dengan adanya bantuan ini, keluarga berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka tanpa harus mengorbankan pengeluaran penting lainnya seperti biaya sekolah atau kesehatan (Sapitri et al., 2025). Hal ini

secara langsung membantu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin akibat lonjakan harga pangan.



Tabel 1. 3 Subsidi Pangan (Miliar Rupiah)

Tahun	Provinsi		
	DKI Jakarta	DIY	Bali
2018	20,69	77,37	17,51
2019	241,90	399,42	399,42
2020	39,68	71,02	33,90
2021	531,32	907,72	429,75
2022	528,96	790,79	380,85
2023	470,88	789,65	378,09
2024	487,66	783,21	359,03

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa DIY secara konsisten memberikan subsidi pangan paling besar dibandingkan DKI Jakarta dan Bali, dengan angka tertinggi di tahun 2021 yang mencapai Rp907,7 miliar. Ketiga provinsi ini memiliki pola naik-turun yang serupa, yaitu sempat melonjak tajam pada 2019 dan 2021, namun pernah turun cukup banyak pada tahun 2020.

Memasuki periode 2022 hingga 2024, jumlah subsidinya cenderung stabil meski sedikit berkurang, di mana alokasi dana untuk DKI Jakarta berada di angka menengah sekitar Rp487 miliar, sementara Bali tetap menjadi provinsi dengan bantuan pangan paling rendah di angka Rp359 miliar pada tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa subsidi pangan mengalami peningkatan yang sangat besar sejak tahun 2018 dan tetap dipertahankan pada nilai yang tinggi hingga saat ini.

Sejalan dengan upaya penekanan tingkat kemiskinan, alokasi dan efektivitas belanja pendidikan masih menjadi tantangan dan fokus utama di Indonesia (Novitasari et al., 2024). Meskipun pemerintah secara konstitusional

telah mengamanatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN, realisasi dan distribusi belanja ini di tingkat daerah dinilai masih belum optimal dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Cholily, 2024).

Hambatan serius dalam pengentasan kemiskinan melalui jalur edukasi ini sering kali dipicu oleh ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur sekolah antardaerah, sehingga investasi modal manusia (*human capital*) tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan kelompok miskin (Afzal et al., 2010). Oleh karena itu, perubahan belanja pendidikan yang lebih besar terutama yang difokuskan pada peningkatan keterampilan vokasional dan pemerataan fasilitas menjadi target penurunan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara berkelanjutan (Dwiputrianti et al., 2026). Berdasarkan urgensi tersebut, maka efisiensi belanja pendidikan di Indonesia harus segera ditingkatkan demi memutus rantai kemiskinan.

Tabel 1. 4 Belanja Pendidikan (Miliar Rupiah)

Tahun	Provinsi		
	DKI Jakarta	DIY	Bali
2018	3.947,95	423,43	455,68
2019	5.444,71	428,90	466,14
2020	3.652,41	437,27	474,40
2021	4.313,42	587,60	668,79

2022	4.569,89	593,93	529,95
2023	4.441,53	509,35	501,60
2024	4.887,96	614,08	654,83

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2024)

Berdasarkan data realisasi anggaran yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mencatatkan alokasi belanja pendidikan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi DIY dan Bali selama periode 2018 hingga 2024. Alokasi belanja pendidikan DKI Jakarta sempat menyentuh angka tertingginya pada tahun 2019 sebesar Rp5,44 triliun sebelum mengalami fluktuasi di tahun-tahun berikutnya, dan kembali menguat ke angka Rp4,88 triliun pada tahun 2024.

Sementara itu, Provinsi DIY menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan peningkatan dari Rp423,43 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp614,07 miliar pada akhir periode pengamatan di tahun 2024. Pola pertumbuhan yang serupa juga terlihat pada Provinsi Bali, di mana anggaran belanja pendidikannya mengalami kenaikan dari Rp455,67 miliar di tahun 2018 hingga berhasil mencapai angka tertinggi di tahun 2024, yakni sebesar Rp654,83 miliar.

Tabel 1. 5 Angka Kriminalitas

Provinsi	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	34.655	31.934	26.585	29.103	32.534	87.426	77..261
DIY	6.731	6.650	7.721	4.774	10.491	12.061	11.659
Bali	3.212	3.047	2.597	2.404	6.304	11.916	13.848

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Pemilihan DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali sebagai fokus penelitian didasarkan pada fenomena paradoks pembangunan ekonomi (*urban paradox*). Sebagai tiga wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif maju di Indonesia, ketiga daerah ini justru menghadapi residu sosial yang pelik berupa tingginya angka kriminalitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.5, tren jumlah tindak pidana yang dilaporkan (*crime total*) di ketiga wilayah ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Di DKI Jakarta, angka kriminalitas melonjak pesat hingga mencapai 87.426 kasus pada tahun 2023. Fenomena serupa juga terjadi di DI Yogyakarta dan Bali, di mana angka kriminalitas pada tahun 2024 masing-masing menyentuh angka 11.659 kasus dan 13.848 kasus, menandakan lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun awal periode pengamatan.

Tingginya angka kriminalitas ini mengindikasikan bahwa di balik statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, terdapat kantong-kantong kemiskinan akut dan ketimpangan pendidikan yang lebar antara kaum urban dengan masyarakat kelas bawah. Kesenjangan sosial ekonomi yang tajam di wilayah perkotaan memicu tekanan beban hidup yang mendalam, yang pada akhirnya mendorong terjadinya gesekan sosial serta memicu tindakan kriminalitas di wilayah sekitarnya.

Oleh karena itu, meneliti pengaruh kebijakan fiskal daerah seperti belanja sosial, subsidi pangan, dan belanja pendidikan di ketiga wilayah maju ini menjadi sangat penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas intervensi anggaran pemerintah mampu menekan kemiskinan absolut sekaligus meredam potensi kerawanan sosial di daerah pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan data dan permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif instrumen kebijakan fiskal seperti belanja sosial, subsidi pangan, dan belanja pendidikan, menekan angka kemiskinan di daerah dengan karakteristik ekonomi yang maju dengan masing-masing perbedaan sebagai pilar ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini memilih DKI Jakarta, DI Yogyakarta (DIY), dan Bali sebagai subjek karena kedudukannya yang berbeda sebagai pilar ekonomi nasional yang menghadapi kemiskinan dengan cara yang berbeda. DKI Jakarta mewakili pusat jasa dan ekonomi global, DIY sebagai magnet ekonomi kreatif dan budaya, serta Bali merepresentasikan ekonomi berbasis pariwisata dengan guncangan budaya luar. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta, DIY dan Bali pada periode 2018-2024.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh Subsidi Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Subsidi Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, DIY, dan Bali pada periode tahun 2018-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai efektivitas instrumen kebijakan fiskal dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat regional.
2. Menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika kemiskinan dengan menggunakan analisis data panel pada wilayah dengan karakteristik ekonomi yang beragam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta, DIY, dan Bali, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengalokasian anggaran belanja sosial agar lebih efisien.
2. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai korelasi pengangguran terhadap kemiskinan pasca-pandemi hingga tahun 2024.